

2023



# LAPORAN KEUANGAN PERIODE TAHUNAN AUDITED

**SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahunan - audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 12 Februari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya  
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang,



Fajar Kurniawan, ST.,M.AP.,M.MG  
NIP. 197608042003121003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
Pernyataan Tanggung Jawab .....	III
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional .....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca .....	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	30
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	40
VI. Lampiran dan Daftar.....	47

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 12 Februari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya  
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang,



Fajar Kurniawan, ST.,M.AP.,M.MG  
NIP. 19760804 200312 1 003

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Audited Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Periode Pelaporan Tahunan, Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 963,828,503 atau mencapai 183,82 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 524,347,000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 13,388,427,399 atau mencapai 97,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13,755,908,000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 11,674,291,150 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 410.000; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 11,009,949,872; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 663,931,278.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing – masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 11,674,291,150,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 963,828,503 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 13,087,437,845 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (12,123,609,342). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp (12,123,609,342) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (12,123,609,342).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 11,436,306,839 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (12,123,609,342) kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas senilai Rp (62,470,243) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 12,424,063,896 juga dikurangi kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp 237,984,311 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 11,674,291,150.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DES TA 2023		% thd Angg	31 DES TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	524.347.000	963.828.503	183,82	859249343
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>524.347.000</b>	<b>963.828.503</b>	<b>183,82</b>	<b>859.249.343</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	6.468.625.000	6.443.837.548	99,62	5.833.329.018
Belanja Barang	B.4	6.776.283.000	6.434.239.851	94,95	5.670.126.356
Belanja Modal	B.5	511.000.000	510.350.000	99,87	969.565.050
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.755.908.000</b>	<b>13.388.427.399</b>	<b>97,33</b>	<b>12.473.020.424</b>

## II. NERACA

### BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG NERACA - Audited PER 31 Desember 2023 dan 2022

(DalamRupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4,032,696	(4,032,696)	(100.00)
Persediaan	410,000	1,269,000	(859,000)	(67.69)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>410,000</b>	<b>5,301,696</b>	<b>(4,891,696)</b>	<b>(92.27)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	5,479,100,000	5,479,100,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,113,549,055	5,429,548,400	(315,999,345)	(5.82)
Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	4,829,073,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,660,000	78,660,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	0	627,424,609	(627,424,609)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,490,432,183)	(5,008,675,070)	518,242,887	(10.35)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>11,009,949,872</b>	<b>11,435,130,939</b>	<b>(425,181,067)</b>	<b>(3.72)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	1,480,513,954	220,811,525	1,259,702,429	570.49
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(816,582,676)	(220,811,525)	(595,771,151)	269.81
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>663,931,278</b>	<b>0</b>	<b>663,931,278</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11,674,291,150</b>	<b>11,440,432,635</b>	<b>233,858,515</b>	<b>2.04</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	93,100	(93,100)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	0	4,032,696	(4,032,696)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>	<b>4,125,796</b>	<b>(4,125,796)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>4,125,796</b>	<b>(4,125,796)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	11,674,291,150	11,436,306,839	237,984,311	2.08
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11,674,291,150</b>	<b>11,436,306,839</b>	<b>237,984,311</b>	<b>2.08</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11,674,291,150</b>	<b>11,436,306,839</b>	<b>237,984,311</b>	<b>2.08</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>11,674,291,150</b>	<b>11,440,432,635</b>	<b>233,858,515</b>	<b>2.04</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG LAPORAN OPERASIONAL - Audited

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	963.828.503,	852.899.309,	110.929.194,	13,006
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	963.828.503,	852.899.309,	110.929.194,	13,006
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan	963.828.503,	852.899.309,	110.929.194,	13,006
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
Beban Pegawai	6.443.837.548,	5.837.361.714,	606.475.834,	10,39
Beban Persediaan	109.399.458,	93.447.336,	15.952.122,	17,071
Beban Barang dan Jasa	2.688.745.726,	2.425.932.554,	262.813.172,	10,833
Beban Pemeliharaan	506.802.908,	249.451.991,	257.350.917,	103,167
Beban Perjalanan Dinas	2.830.097.159,	2.623.212.804,	206.884.355,	7,887
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	299.960.500,	301.184.641,	(1.224.141,)	(0,406)
Beban Bunga	0,	0,	0,	0,
Beban Subsidi	0,	0,	0,	0,
Beban Hibah	0,	0,	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.594.546,	448.954.051,	(240.359.505,)	(53,538)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,	0,	0,	0,
Beban Transfer	0,	0,	0,	0,
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,	0,
JUMLAH BEBAN	13.087.437.845,	11.979.545.091,	1.107.892.754,	9,248
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12.123.609.342,)	(11.126.645.782,)	(996.963.560,)	8,96
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0,	5.050.000,	(5.050.000,)	(100,)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,	5.050.000,	(5.050.000,)	(100,)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	1.300.034,	(1.300.034,)	(100,)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	1.300.034,	(1.300.034,)	(100,)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,	0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	6.350.034,	(6.350.034,)	(100,)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12.123.609.342,)	(11.120.295.748,)	(1.003.313.594,)	9,022
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	0,
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	0,
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12.123.609.342,)	(11.120.295.748,)	(1.003.313.594,)	9,022

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - Audited**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,436,306,839	11,111,341,372	324,965,467	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,123,609,342)	(11,120,295,748)	(1,003,313,594)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(62,470,243)	0	(62,470,243)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(62,470,243)	0	(62,470,243)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,424,063,896	11,613,771,081	810,292,815	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	237,984,311	493,475,333	(255,491,022)	-
EKUITAS AKHIR	11,674,291,150	11,604,816,705	69,474,445	-

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau pulau kecil terluar serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER.65/MEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Pertanian Lubuk Minturun, Sei Duo - Sungai Lareh, Padang Propinsi Sumatera Barat.

Salah satu fungsi Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang yaitu dibidang ketata usahaan adalah dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya.

dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akruwal  
Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akruwal Pertama Kali**

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Perbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian

akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## **B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Realisasi  
Pendapatan Rp  
963,828,503*

### *B.1 Pendapatan*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 963,828,503 atau mencapai 183,82 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 524,347,000. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2023	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4.950.808
Pendapatan Perizinan Lainnya	63.180.000	296.730.000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	461.167.000	662.147.695
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>524.347.000</b>	<b>963.828.503</b>

Adapun Realisasi Pendapatan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2023 BPSPL Padang dapat dirinci sebagai berikut;

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas sebesar Rp 4,950,808. Pendapatan ini diperoleh dari

sewa Rumah Negara Golongan I – Type D yang disewa oleh Pimpinan Kantor dan Pegawai BPSPL Padang. Adapun rincian pendapatan setiap bulannya adalah;

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (RN)						
Sampai Dengan Periode Pelaporan Tahunan - TA. 2023						
No	Periode	No. SPM	No. SP2D	Akun	Nilai	Ket
1	01	001T/499346/2023	230101506000007	425131	264.000	
2	02	003T/499346/2023	230101506000093	425131	264.000	
3	03	023T/499346/2023	230101506000164	425131	264.000	
4	04	058T/499346/2023	230101506000302	425131	264.000	
5	05	101T/499346/2023	230101506000623	425131	264.000	
6	06	125T/499346/2023	230101506000690	425131	264.000	
7	07	150T/499346/2023	230101506000879	425131	264.000	
8	08	185T/499346/2023	230101506000992	425131	263.000	
9	08	215T/499346/2023	230101506001140	425131	264.000	
10	09	225T/499346/2023	230101506001141	425131	264.000	
11	Kurang Bayar Hasil Audit Kinerja Internal				617.014	Audit
12	Kurang Bayar (NTPN; 3BC8F48VV5UA0ARO)				62.215	Audit
13	10	257T/499346/2023	230101506001217	425131	652.598	
14	11	283T/499346/2023	230101506001384	425131	652.598	
15	12	319T/499346/2023	230101506001444	425131	327.383	
<b>Total</b>					<b>4.950.808</b>	

- b. Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 662,147,695 berupa pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- c. Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya sebesar Rp 296,730,000, penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.

*Realisasi  
Belanja Negara*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13,388,427,399 atau 97,33% dari anggaran belanja setelah revisi

Rp.13,388,427,  
399

sebesar Rp 13,755,908,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6.468.625.000	6.443.838.675	99,62
Belanja Barang	6.776.283.000	6.434.239.851	94,95
Belanja Modal	511.000.000	510.350.000	99,87
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>13.755.908.000</b>	<b>13.388.428.526</b>	<b>97,33</b>
Pengembalian	-	1.172	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.755.908.000</b>	<b>13.388.427.354</b>	<b>97,33</b>

Belanja  
Pegawai Rp  
6,443,838,675,-

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Periode Januari – Desember TA 2023 sebesar Rp 6,443,838,675, atau 99,62 persen dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp. 6,468,625,000, yang merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

*Rincian Belanja Pegawai TA 2023*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TA 2023
Belanja Gaji dan UM	2.500.897.000	2.494.198.225
Belanja Tunjangan	648.046.000	647.852.560
Belanja Gaji dan UM (PPPK)	15.125.000	14.271.384
Belanja Tunjangan (PPPK)	2.450.000	2.449.680
Belanja Lembur	66.528.000	61.867.000
Belanja Lembur (PPPK)	824.000	474.000
Belanja Vakasi	-	-
Belanja Tunj. Khusus	3.215.814.000	3.204.214.655
Belanja Tunj. Khusus (PPPK)	18.941.000	18.511.171
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.468.625.000</b>	<b>6.443.838.675</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	1.127
<b>Jumlah Belanja (Netto)</b>	<b>6.468.625.000</b>	<b>6.443.837.548</b>

Pengembalian belanja pegawai dapat disampaikan yaitu; Pengembalian atas pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 1.127,- dan telah dilakukan pemotngan melalui SPM gaji.

*Belanja Barang*  
Rp  
6,434,239,851

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6,434,239,851 atau sebesar 94,95 persen dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp. 6,776,283,000,-

##### *Rincian Belanja Barang TA 2023*

<b>URAIAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Porsentase(%)</b>
Belanja Barang Operasional	1.077.597.000	1.066.830.110	99,00
Belanja Barang Non Operasional	578.042.000	542.365.986	93,83
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	108.600.000	108.540.458	99,95
Belanja Jasa	1.221.604.000	1.079.642.730	88,38
Belanja Pemeliharaan	508.898.000	506.802.908	99,59
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.981.542.000	2.830.097.159	94,92
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	300.000.000	299.960.500	99,99
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.776.283.000</b>	<b>6.434.239.851</b>	<b>94,95</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.776.283.000</b>	<b>6.434.239.851</b>	<b>94,95</b>

*Belanja Modal*  
Rp.  
510.350.000,-

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal periode Januari – Desember TA 2023 sebesar Rp.

510.350.000, atau sebesar 99,87 persen dari pagu anggaran setelah direvisi yaitu sebesar Rp. 511.000.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

##### *Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2023*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	Porsentase(%)
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511.000.000	510.350.000	99,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>511.000.000</b>	<b>510.350.000</b>	<b>99,87</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>511.000.000</b>	<b>510.350.000</b>	<b>99,87</b>

*Belanja Modal Tanah*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang untuk periode Januari – Desember TA 2023.

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 510.350.000*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode Januari – Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 510.350.000 atau sebesar 99,87 persen dari pagu anggaran setelah direvisi yaitu sebesar Rp. 511.000.000. Rincian belanja modal peralatan dan mesin pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang pada Tahun Anggaran 2023 meliputi;

- a. Belanja modal peralatan dan mesin - laptop sebanyak 6 unit Nomor Kontrak B.1292/BPSPL.1/PL.420/IX/2023 dengan Nilai Kontrak Rp. 180.000.000,-
- b. Belanja modal peralatan dan mesin - drone RTK sebanyak 1 unit dengan Nomor Kontrak B.1293/BPSPL.1/PL.420/IX/2023 dengan Nilai Kontrak Rp. 73.000.000,-
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - GPS Handheld sebanyak 14 unit Dengan Nomor Kontrak B.1369/BPSPL.1/PL.420/X/2023 dengan nilai Kontrak Rp. 112.000.000,-
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 Satker BPSPL Padang terdiri dari 6 unit Laptop, 2 Unit Tablet, dan 2 Unit RFID dengan Nomor Kontrak B.1702/BPSPL.1/PL.420/XI/2023 dengan Nilai Kontrak 132.000.000,-

<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0</i>	<b>B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b> Realisasi Belanja Modal periode Januari – Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 0,-
<i>Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan Rp.0</i>	<b>B.5.4 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan</b> Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Januari – Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 0.
<i>Belanja Modal Lainnya Rp. 0</i>	<b>B.5.5 Belanja Modal Lainnya</b> Realisasi Belanja Modal Lainnya periode Januari – Desember TA 2023 adalah sebesar Rp 0,-

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-</i>	<b>C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran</b> Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-
<i>Kas di Bendahara Penerimaan Rp0</i>	<b>C.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b> Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Satker BPSPL Padang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0.
<i>Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0</i>	<b>C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas</b> Tidak ada Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023.
<i>Piutang PNBPNP Rp 0</i>	<b>C.4 Piutang PNBPNP</b> Terdapat Piutang PNBPNP pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

<p><i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i></p>	<p><b>C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</b></p> <p>Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023.</p>
<p><i>Bagian Lancar TPA Rp0</i></p>	<p><b>C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b></p> <p>Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023.</p>
<p><i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i></p>	<p><b>C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar</b></p> <p>Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023.</p>
<p><i>Belanja Dibayar di Muka Rp 0,-</i></p>	<p><b>C.8 Beban Dibayar di Muka</b></p> <p>Beban Dibayar di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-.</p>
<p><i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp 0,-</i></p>	<p><b>C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima</b></p> <p>Tidak ada Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023.</p>
<p><i>Persediaan Rp. 410.000,-</i></p>	<p><b>C.10 Persediaan</b></p> <p>Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 410,000,-. Yang terdiri dari sisa persediaan berupa barang konsumsi (Alat Tulis Kantor). Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.</p>

Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tidak ada Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023.

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0

### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang Jangka  
Panjang Rp0

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023.

Tanah  
Rp.  
5,479,100,000

### **C.14 Tanah**

Saldo Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 5,479,100,000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset tanah pada TA 2023. Tanah tersebut seluas 7.325 meter persegi berlokasi di Jalan Raya Pertanian Sungai Duo – Sungai Lareh Kelurahan Lubuk Minturun Kota Padang dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp  
5,113,549,055

### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah Rp 5,113,549,055. Terdapat penurunan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dikarenakan penyusutan nilai aset. Adapun penyusutan sampai dengan periode pelaporan dapat dirinci sebagai berikut;

<b>Saldo Nilai Peralatan dan Mesin Sampai Periode Pelaporan 31 Desember 2023</b>	
Saldo Peralatan Dan Mesin	5.113.549.055
Akumulasi Penyusutan	3.755.654.360
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.357.894.695</b>

Selain itu sampai akhir periode pelaporan terdapat TKTM peralatan dan mesin yaitu;

1. TKTM antara Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru berupa laptop dengan NUP 53 kode barang 3.10.01.02.002 dan NUP 56 kode barang 3.10.01.02.003, dengan masing – masing BAST Nomor B.10/BPSPL.1/PL.730/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dan BAST Nomor B.1264/LKKPN/PL.450/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023.
2. Adanya pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 510,350,000 yang terdiri dari pengadaan Laptop, GPS, Drone, Tablet, dan RFID.

Peralatan dan mesin dibawah penguasaan BPSPL Padang sampai dengan Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaanya (PSP).

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp  
4,829,073,000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Saldo Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp 4,829,073,000. Tidak ada penambahan nilai Gedung dan Bangunan selama periode pelaporan. Selain itu Gedung dan Bangunan yang ada di lingkungan BPSPL Padang secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaanya (PSP).

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>4.829.073.000</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.829.073.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	- 708.475.936
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.120.597.064</b>

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp  
78,660,000*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 78,660,000. Tidak ada terdapat mutasi tambah ataupun kurang selama akhir periode pelaporan. Adapun Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>78.660.000</b>
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>78.660.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	- 26.301.887
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>52.358.113</b>

Selain itu Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada di lingkungan BPSPL Padang secara keseluruhan telah dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP).

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp 0*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp 0. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	-
Pengadaan aset tetap lainnya	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan Rp  
0

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp  
(5,008,675,070)

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 Rp. (5,008,675,070). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.113.549.055	3.755.654.360	1.357.894.695
2	Gedung dan Bangunan	4.829.073.000	708.475.936	4.120.597.064
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.660.000	26.301.887	402.237.459
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>10.021.282.055</b>	<b>4.490.432.183</b>	<b>5.880.729.218</b>

Aset Tak  
Berwujud Rp 0

### C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang periode pelaporan sampai 31 Desember 2023 senilai Rp. 0,-

Aset Lain-Lain  
Rp  
1,480,513,954

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain – lain per 31 Desember 2023 adalah Rp 1,480,513,954. Aset Lain – lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan telah ditetapkan status penggunaannya (PSP).

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp  
816,582,676

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp 816,582,676. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	1.480.513.954	816.582.676	663.931.278
<b>Jumlah</b>	<b>1.480.513.954</b>	<b>816.582.676</b>	<b>663.931.278</b>

Uang Muka dari  
KPPN Rp 0

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang yang  
belum  
ditagihkan Rp 0

### C.25 Utang yang belum ditagihkan

Saldo utang yang belum ditagihkan pada periode palaporan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-.

Utang kepada  
Pihak Ketiga Rp  
0

### C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-

Pendapatan  
yang

### C.27 Pendapatan yang Ditangguhkan

*Ditangguhkan  
Rp0*

Tidak ada Pendapatan yang Ditangguhkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023.

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka Rp0*

### **C.28 Pendapatan Diterima di Muka**

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang per 31 Desember 2020.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp 0*

### **C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

*Ekuitas  
Rp  
11,674,291,150*

### **C30. Ekuitas**

Pada Laporan Keuangan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 11,674,291,150. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,436,306,839	11,111,341,372	324,965,467	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,123,609,342)	(11,120,295,748)	(1,003,313,594)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(62,470,243)	0	(62,470,243)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(62,470,243)	0	(62,470,243)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,424,063,896	11,613,771,081	810,292,815	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	237,984,311	493,475,333	(255,491,022)	-
EKUITAS AKHIR	11,674,291,150	11,604,816,705	69,474,445	-

Pendapatan  
PNBP  
Rp  
971,068,503

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 971,068,503. Rincian Laporan pendapatan ini dapat disampaikan sebagai berikut;

Uraian	Sampai dengan 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	524.347.000	971.068.503	185,20
Pengembalian Pendapatan (PNBP)		- 7.240.000	
<b>Jumlah</b>	<b>524.347.000</b>	<b>963.828.503</b>	<b>183,82</b>

Adapun Realisasi Pendapatan Periode Tahunan - Tahun Anggaran 2023 BPSPL Padang dapat dirinci sebagai berikut;

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas sebesar Rp 4,950,808. Pendapatan ini diperoleh dari sewa Rumah Negara Golongan I - Type D yang disewa oleh Pimpinan Kantor dan Pegawai BPSPL Padang. Adapun rincian pendapatan setiap bulannya adalah;

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (RN)						
Sampai Dengan Periode Pelaporan Tahunan - TA. 2023						
No	Periode	No. SPM	No. SP2D	Akun	Nilai	Ket
1	01	001T/499346/2023	230101506000007	425131	264.000	
2	02	003T/499346/2023	230101506000093	425131	264.000	
3	03	023T/499346/2023	230101506000164	425131	264.000	
4	04	058T/499346/2023	230101506000302	425131	264.000	
5	05	101T/499346/2023	230101506000623	425131	264.000	
6	06	125T/499346/2023	230101506000690	425131	264.000	
7	07	150T/499346/2023	230101506000879	425131	264.000	
8	08	185T/499346/2023	230101506000992	425131	263.000	
9	08	215T/499346/2023	230101506001140	425131	264.000	
10	09	225T/499346/2023	230101506001141	425131	264.000	
11	Kurang Bayar Hasil Audit Kinerja Internal				617.014	Audit
12	Kurang Bayar (NTPN; 3BC8F48VV5UA0ARO)				62.215	Audit
13	10	257T/499346/2023	230101506001217	425131	652.598	
14	11	283T/499346/2023	230101506001384	425131	652.598	
15	12	319T/499346/2023	230101506001444	425131	327.383	
<b>Total</b>					<b>4.950.808</b>	

- b. Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 662,147,695 berupa pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- c. Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya sebesar Rp 296,730,000, penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- d. Terdapat Pengembalian Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya (425259) sebesar Rp. 840,000,- merupakan pengembalian atas kesalahan penghitungan pengenaan PNBPN atau kelebihan bayar penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- e. Pengembalian Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 6,400,000,- merupakan pengembalian atas kesalahan penghitungan pengenaan PNBPN atau kelebihan bayar dari hasil biaya pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.

## Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp

6.443.576.836

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.443.576.836. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### *Rincian Beban Pegawai Tahun 2023*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>Per 31 Des 2023</b>	<b>Per 31 Des 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Gaji PNS & PPPK	2.174.758.482	2.467.781.388	-11,87
Beban Tunjangan PNS & PPPK	3.872.767.354	3.330.792.608	16,27
Beban Uang Makan PNS & PPPK	333.710.000		
Beban Honor dan Vakasi	0	0	
Beban Lembur PNS & PPPK	62.341.000	35.237.000	76,92
<b>Jumlah</b>	<b>6.443.576.836</b>	<b>5.833.810.996</b>	<b>81,32</b>

Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan 81,32 persen dari anggaran tahun sebelumnya (TA. 2022) dikarenakan adanya kenaikan pangkat/Golongan Pegawai, Gaji Berkala, dan adanya tambahan PPPK sebanyak 1 Pegawai.

Beban

Persediaan Rp

109,399,458

## **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 109,399,458. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai, termasuk barang – barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pada Akhir periode

palaporan sisa persediaan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 410.000 yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK).

*Beban Barang dan Jasa Rp 2.688.745.726*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Pada Laporan Keuangan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp 2.688.745.726. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>TH 2023</b>
Beban Keperluan Perkantoran	755.308.111
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.080.104
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	149.856.000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID	0
Beban Barang Operasional Lainnya	148.585.895
Beban Bahan	204.378.046
Beban Honor Output Kegiatan	268.460.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	69.527.940
Beban Langganan Listrik	80.198.319
Beban Langganan Telepon	6.663.751
Beban Langganan Air	4.873.785
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112.440.819
Beban Sewa	684.920.000
Beban Jasa Profesi	28.900.000
Beban Jasa Lainnya	161.552.956
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.688.745.726</b>

*Beban Pemeliharaan Rp 506.802.908*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 506.802.908. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283.149.996
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223.652.912
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	
<b>Jumlah</b>	<b>506.802.908</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas Rp  
2.830.097.159*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.830.097.159. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023
Beban Perjalanan Biasa	1.531.552.436
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	251.562.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106.750.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	940.232.723
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.830.097.159</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp  
299,960,500*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan periode pelaporan 30 Desember 2023 sebesar Rp 299,960,500. Barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Kelompok tersebut berupa peralatan dan mesin diantaranya; Perahu/Speedboat, Mesin Tempel, Kamera, Alat selam, dan peralatan lainnya. Adapun penerima bantuan tersebut yaitu;

- Kelompok Poseidon Driver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai – Sumatera Barat, dengan BAST Nomor; 255/BPSPL.1/PRL.440/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023, Jenis Bantuan yang diberikan berupa kamera underwater dan alat selam dengan nilai bantuan Rp. 99.000.500,-
- Kelompok Banyu Biru (Dusun Sungai Kong, Desa Simpang Tiga, Kec. Tulang Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan) dengan BAST Nomor BAST.360/BPSPL.1/PRL.440/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023, Jenis Bantuan yang diberikan berupa kamera underwater dan alat selam dengan nilai bantuan sebesar Rp. 90.970.000,-
- Kelompok Hiu Macan (Kelurahan. Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi). Dengan BAST. 402/BPSPL.1/PRL.440/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023, jenis bantuan yang diserahkan berupa kapal boat fiber beserta kelengkapannya dengan nilai bantuan Rp. 109.990.000,-

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sampai Dengan Periode Pelaporan Tahunan, Tanggal 31 Desember 2023*

Akun	Uraian	Jumlah
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	
	1. Kelompok Poseidon Driver Mentawai	99.000.500,
	2. Kelompok Banyu Biru	90.970.000,
	3. Kelompok Hiu Macan	109.990.000,
<b>JUMLAH</b>		<b>299.960.500,</b>

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi Rp  
208.594.546*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp 208.594.546. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Tahun Anggaran 2023*

<b>URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>TH 2023</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151.724.947
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.677.776
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.592.142
Beban Penyusutan Irigasi	599.681
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>208.594.546</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 sebesar Rp 0.

*Surplus dari  
Kegiatan Non*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan

*Operasional  
Rp 0*

merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0. Rincian sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023*

URAIAN	TH 2023
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>

*Pos Luar  
Biasa Rp 0*

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 0,-.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp.  
11,436,306,839*

*E.1 Ekuitas Awal*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 11,436,306,839. Nilai ekuitas awal TA. 2023 lebih besar dibanding dengan nilai ekuitas awal TA. 2022 yaitu 11,111,341,372, atau adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 324,965,467 hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah/besaran DIPA TA. 2023 dengan TA. 2022.

*Defisit LO  
Rp -  
(12,123,609,342)*

*E.2 Surplus (Defisit) LO*

Pada Laporan Keuangan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.

(12,123,609,342). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

### *E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

### *E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,-.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Persediaan  
Aset Tetap/Aset  
Lainnya Rp0*

### *E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya*

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,-.

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Non  
Revaluasi Rp 0*

### *E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap Non Revaluasi untuk tahun 2023 sebesar Rp 0.

*Koreksi Nilai  
Aset lainnya*

### *E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi*

*Non Revaluasi* Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp. (62,470,243),-. Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan hasil dari transaksi yang diperoleh secara otomatis oleh aplikasi SAKTI terkait koreksi nilai dan NUP Rumah Negara.

*Transaksi*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Antar Entitas*

*Rp*

12,424,063,896

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing – masing sebesar Rp 12,424,063,896 dan Rp 11,613,771,081. Dengan Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas;

313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	13.388.427.399,	8.301.884.893,
313121	Diterima dari Entitas Lain	-963.828.503,	-608.207.395,
313211	Transfer Keluar	-12.250.000,	0,
313221	Transfer Masuk	11.715.000,	0,
<b>JUMLAH</b>		<b>12.424.063.896,</b>	<b>7.693.677.498,</b>

**E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)**

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DKEL sebesar Rp 13.288.427.399, sedangkan DDEL sebesar Rp (963.828.503).

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.715.000.- Sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp (12.250.000).

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung maupun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang.

#### *Ekuitas Akhir* **E.5 Ekuitas Akhir**

*Rp*

*11,674,291,150*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 11,674,291,150. Nilai ekuitas diakhir periode pelaporan terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 69,474,445. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan nilai ekuitas sampai akhir periode pelaporan.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN Itjen/BPK**

Adanya pemeriksaan/audit kinerja itjen pada periode pelaporan sampai dengan periode pelaporan Tahunan - Tahun Anggaran 2023, dengan hasil evaluasi yaitu :

1. Reviu SOP Penerbitan Tagihan dan pembayaran PNPB lingkup BPSPL Padang Nomor 1337/BPSPL.1/OT.310//IX/2021 Tanggal 17 September 2021, karena SOP tersebut belum mengakomodir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021

Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. Pelaporan penggunaan Dana PNBPA TA. 2022 sebesar Rp. 1.617.751.000,- dengan Realisasi penggunaan Rp. 1.575.079.567,- atau sebesar 97,36% belum dilaporkan/disampaikan kepada Es.I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, serta Biro Keuangan Setjen KKP.
3. Terdapat kurang pungut PNBPA atas sewa Rumah Negara TA. 2022 – 2023 senilai Rp. 617.014,-

Tindak lanjut pemeriksaan/audit kinerja itjen telah diselesaikan secara tuntas sebagaimana terlampir hasil tangkap layar aplikasi SIDAK dan NTPN/bukti setor Billing 820230828182379 dan NTPN 063468N3EAL20IRB.

## **F.2 REKENING PEMERINTAH**

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor BPSPL Padang adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat A/C 2100.0101.01325-1 a.n. BPG 010 BPSPL Padang dengan nomor NPWP 00.159.912.5-201.000

## **F.3 Revisi Anggaran**

### **Revisi Anggaran ke - 1**

Terbit tanggal 24 Desember 2023. Ruang lingkup revisi mencakup perubahan tagging blokir dari semula tagging blokir senilai Rp 1.622.000.000,- dengan rincian: 1) Blokir Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp 1.200.000.000,-; 2) Blokir Non ABT senilai Rp 422.000.000,- menjadi 1) Blokir Automatic Adjustment (AA) senilai Rp 1.200.000.000,-; 2) Blokir Non ABT senilai Rp 422.000.000,-

### **Revisi Anggaran ke -2**

Terbit tanggal 25 Januari 2023. Ruang lingkup revisi merupakan pemutakhiran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran

**Revisi Anggaran ke - 3**

Terbit tanggal 28 Februari 2023. Ruang lingkup revisi merupakan Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA dan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran.

**Revisi Anggaran ke - 4**

Terbit tanggal 12 April 2023. Ruang lingkup revisi merupakan Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA dan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran.

**Revisi Anggaran ke - 5**

Terbit tanggal 19 Mei 2023. Ruang lingkup revisi merupakan pemutakhiran KPA dan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran.

**Revisi Anggaran ke - 6**

Terbit tanggal 12 Juli 2023. Ruang lingkup revisi merupakan Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA dan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran.

**Revisi Anggaran ke - 7**

Terbit tanggal 30 Agustus 2023. Ruang lingkup revisi merupakan penambahan pagu bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1.239.428.000,- dan perubahan catatan Halaman IV A mengenai blokir anggaran yang disebabkan adanya pagu

bersumber PNBPN yang terkena blokir. Pagu tersebut berupa belanja modal RFID sebesar Rp 12.000.000,- akibat ketidaksesuaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) - Rincian Output.

#### **Revisi Anggaran ke - 8**

Terbit tanggal 12 Oktober 2023. Ruang lingkup revisi merupakan Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam Halaman III DIPA dan perubahan anggaran di dalam RO yang sama dengan tujuan optimalisasi anggaran.

#### **Revisi Anggaran ke - 9**

Terbit tanggal 19 Oktober 2023. Ruang lingkup revisi merupakan perubahan catatan Halaman IV A mengenai blokir anggaran yang disebabkan adanya penarikan blokir anggaran dengan tagging Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp 1.200.000.000,- dan pembukaan blokir anggaran non ABT sebesar Rp 184.000.000,-. Masih terdapat blokir anggaran non ABT sebesar Rp 250.000.000,-. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu dari semula Rp 15.755.908.000,- menjadi Rp 14.555.908.000,-

#### **Revisi Anggaran ke - 10**

Terbit tanggal 9 November 2023. Ruang lingkup revisi merupakan pergeseran anggaran antar satker dan pergeseran antar jenis belanja. Pergeseran anggaran antar satker berupa pergeseran belanja pegawai sebesar Rp 800.000.000,- dari Satker BPSPL Padang ke Satker Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan pergeseran anggaran antar jenis belanja yaitu menggeser anggaran sebesar Rp 205.668.000,- dari belanja modal menjadi belanja barang untuk operasional perkantoran. Revisi ini mengakibatkan perubahan pagu dari semula Rp 14.555.908.000,- menjadi Rp 13.755.908.000,-

#### **Revisi Anggaran ke - 11**

Terbit Tanggal 29 November 2023. Ruang Lingkup revisi merupakan pergeseran anggaran antar jenis belanja khususnya belanja barang (52) untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

#### **Revisi Anggaran ke - 12**

Terbit tanggal 20 Desember 2023. Ruang Lingkup revisi merupakan pergeseran anggaran dan pagu minus di belanja pegawai. Pergeseran anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 9.470.000,- terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja). Sedangkan pergeseran anggaran antar jenis belanja pada belanja barang (52) merupakan untuk optimalisasi penyerapan anggaran.

#### **F.4 Sumber Anggaran**

Terdapat penambahan nilai pada DIPA Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang Tahun Anggaran 2023, yang sebelumnya sebesar Rp. 14.516.480.000,- menjadi Rp. 15.755.908.000,-. Penambahan tersebut bersumber dari dan PNBPN. Secara keseluruhan anggaran BPSPL Padang terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Dukungan Manajemen. Sumber dana pelaksanaan program tersebut berasal dari Rupiah Murni (APBN).

#### **F.5 Tematik DIPA**

Tahun Anggaran 2023, DIPA Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, beberapa kegiatan masuk kedalam salah satu dari 8 tema APBN yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG) (03). Penerapan ARG adalah dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, dimana kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil

pembangunan. Gender disini bukan melihat perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan semata, namun bagaimana interpretasi kita terhadap perbedaan tersebut, untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan/tindakan yang proporsional. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Keluaran (Output) dalam rangka mengurangi/menghilangkan ketidaksetaraan gender (isu gender) dapat

dikategorikan dalam tema ini pada DIPA BPSPL Padang adalah Adaptasi Perubahan Iklim (API (07)) yaitu Anggaran adaptasi perubahan iklim adalah anggaran pemerintah untuk mendanai upaya meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Komponen kegiatan adaptasi perubahan iklim tersebut di implementasikan pada kegiatan **032.07.HB. Program pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Kegiatan 032.07.WA. Program Dukungan Manajemen.** Adapun rincian tematik tersebut adalah sebagai berikut;

Nama Satker	:	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang - 499346
Pagu	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen, Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.751.480.000,-</li> </ol>
Realisasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, Realisasi serapan Anggaran sebesar Rp. 37.904.145,-</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen, Realisasi serapan Anggaran sebesar Rp. 9.686.743.083</li> </ol>
%	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, dengan persentase realisasi sebesar 94,76%.</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen, dengan persentase realisasi sebesar 99,34%</li> </ol>
Satuan Rincian Output	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, Satuan Rincian Out-put nya adalah Rekomendasi Kebijakan</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen, Satuan Rincian Out-put nya adalah Layanan</li> </ol>

Target	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil, Targetnya adalah 1 Rekomendasi Kebijakan.</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen, Satuan Targetnya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Dukungan Manajemen Internal adalah 4 Layanan</li> <li>• Layanan Manajemen SDM Internal adalah 45 orang, layanan, rekomendasi</li> <li>• Layanan Manajemen Kinerja Internal adalah 3 Dokumen, layanan, Laporan, Rekomendasi</li> </ul> </li> </ol>
Capaian Rincian Output	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian RO Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil adalah sebesar 1 Rekomendasi kebijakan</li> <li>2. Kegiatan Dukungan Manajemen; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian RO Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar 4 Layanan</li> <li>• Capaian RO Layanan Manajemen SDM Internal sebesar 61 orang, layanan, rekomendasi</li> <li>• Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar 8 Dokumen, layanan, Laporan, Rekomendasi.</li> </ul> </li> </ol>

%	:	<p>1. Progres Capaian Kegiatan Pendayagunaan Pulau – Pulau Kecil sebesar 100%</p> <p>2. Kegiatan Dukungan Manajemen adalah sebesar 100%</p>
---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### F.5 Kegiatan Program Prioritas Nasional (PN)

Tahun Anggaran 2023, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang terdapat 10 kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan tersebut focus pada kegiatan – kegiatan teknis diantara dapat dirinci sebagai berikut;

KRO	RO	Pagu	Realisasi	%
2362.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	PBW.001 Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	25.000.000	24.885.942	99,54
2362.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	QEH.001 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000	397.382.565	99,35
2362.RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	144.000.000	144.000.000	100
2362.REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	REA.003 Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	250.000.000	0	0

2362.REB Konservasi Jenis/Spesies	REB.001 Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	650.000.000	637.213.149	98,03
	REB.002 Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	959.558.000	947.493.293	98,74
2362.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	UBA.001 Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PulauPulau Kecil	100.000.000	99.087.090	99,09
2365.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	PBW.001 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar	40.000.000	37.904.145	94,76
2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	PBT.009 Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan	941.520.000	925.994.678	98,35

		Pemanfaatan Ruang Laut			
2366.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	367.000.000	366.350.000	99,82
2366.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	SCC.002 Petugas Penyelenggara Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	127.350.000	121.373.454	95,31

#### **F.6 Capaian Rincian OutPut**

Tahun anggaran 2023 sampai dengan periode pelaporan Laporan keuangan ini disusun dapat disampaikan capaian output dari masing – masing kegiatan telah mencapai 100 persen (tabel terlampir);

#### **F.7 Indikator Pelaksanaan Anggaran**

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang sampai dengan pelaporan periode tahunan 2023, capaian indikator pelaksanaan anggaran adalah sebesar 95,34, dengan rincian terlampir;

## F.8 Lampiran

### a. Bukti Setor TL Audit Internal;



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



#### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

##### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230828182379  
 Tanggal Billing : 28-08-2023 09:41:30  
 Tanggal Kedaluwarsa : 04-09-2023 09:41:30  
 Tanggal Bayar : 28-08-2023 10:10:05  
 Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
 Channel Bayar : Mobile Banking  
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BPSPL Padang  
 Kementerian/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 Unit Eselon I : 07 - Ditjen Pengelolaan Ruang Laut  
 Satuan Kerja : 499346 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG  
 Total Disetor : 617,014 (IDR)  
 Terbilang : Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Belas (IDR)  
 Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : 00000624412  
**NTPN** : 063468N3EAL20IRB

##### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
 Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
 Jumlah Setoran : 617,014 (IDR)  
 Keterangan : Kurang pungut PNPB atas sewa Rumah Negara TA 2022 dan 2023

### b. Tangkap Layar aplikasi e-sidak

The screenshot shows the 'e-Layar | Layanan P...' interface of the SIMPONI system. The main content area displays a report titled 'Laporan Hasil Evaluasi PNPB TA 2022-2023 pada BPSPL Padang'. The user profile is identified as Rizki Walnur, S. Kom. The report summary shows 3 findings, 6 recommendations, and a total value of Rp617,014.00. The status of the findings is 'TUNTAS' (Completed) with 100% follow-up action.

ID	Judul Temuan	Σ Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
9740	Penatausahaan PNPB pada BPSPL Padang Belum Seluruhnya Tertib	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
9742	Pelaporan Penggunaan Dana PNPB Belum Tertib	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
9744	Kurang Pungut PNPB atas Sewa Rumah Negara TA 2022-2023 senilai Rp617.014,00	4	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM  
Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4,032,696	(4,032,696)	(100.00)
Persediaan	410,000	1,269,000	(859,000)	(67.69)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>410,000</b>	<b>5,301,696</b>	<b>(4,891,696)</b>	<b>(92.27)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	5,479,100,000	5,479,100,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,113,549,055	5,429,548,400	(315,999,345)	(5.82)
Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	4,829,073,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78,660,000	78,660,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	0	627,424,609	(627,424,609)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,735,190,225)	(5,008,675,070)	273,484,845	(5.46)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>10,765,191,830</b>	<b>11,435,130,939</b>	<b>(669,939,109)</b>	<b>(5.86)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	1,480,513,954	220,811,525	1,259,702,429	570.49
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(820,636,009)	(220,811,525)	(599,824,484)	271.65
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>659,877,945</b>	<b>0</b>	<b>659,877,945</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11,425,479,775</b>	<b>11,440,432,635</b>	<b>(14,952,860)</b>	<b>(0.13)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	364,970	93,100	271,870	292.02
Uang Muka dari KPPN	0	4,032,696	(4,032,696)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>364,970</b>	<b>4,125,796</b>	<b>(3,760,826)</b>	<b>(91.15)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>364,970</b>	<b>4,125,796</b>	<b>(3,760,826)</b>	<b>(91.15)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	11,425,114,805	11,436,306,839	(11,192,034)	(0.10)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11,425,114,805</b>	<b>11,436,306,839</b>	<b>(11,192,034)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>11,425,114,805</b>	<b>11,436,306,839</b>	<b>(11,192,034)</b>	<b>(0.10)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>11,425,479,775</b>	<b>11,440,432,635</b>	<b>(14,952,860)</b>	<b>(0.13)</b>

Keterangan :

FINAL



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	410,000	0
0.0	131111	Tanah	5,479,100,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,113,549,055	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,829,073,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	22,290,000	0
0.0	134112	Irigasi	56,370,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,943,542,800
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	763,153,714
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	20,697,858
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	7,795,853
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,480,513,954	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	820,636,009
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	364,970
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,388,427,399
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	963,828,503	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,250,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,715,000
0.0	391111	Ekuitas	0	11,436,306,839
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	62,470,243	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,950,808
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	296,730,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	662,147,695
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,162,850,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,698	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	159,354,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	39,244,064	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	253,800,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,004,886	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	127,314,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	331,305,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	53,535,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	11,866,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	384	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,160,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,405,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	61,867,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	474,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,204,214,655	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	18,511,171	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	755,308,111	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,080,104	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	149,856,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	148,585,895	0
3.0	521211	Beban Bahan	204,378,046	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	268,460,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	69,527,940	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	80,198,319	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	6,663,751	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,238,755	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,440,819	0
3.0	522141	Beban Sewa	684,920,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	28,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	161,552,956	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283,149,996	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223,652,912	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,531,552,436	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	251,562,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106,750,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	940,232,723	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	339,613,387	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109,355,554	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,184,285	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,199,362	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4,053,333	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	109,399,458	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299,960,500	0
<b>JUMLAH</b>			<b>31,356,468,945</b>	<b>31,356,468,945</b>

Keterangan :

FINAL



## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	13,388,427,399
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	963,828,503	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,950,808
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	297,570,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	668,547,695
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,162,850,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,825	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	159,354,250	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39,244,064	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	253,800,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,004,886	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	127,314,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	331,305,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	53,535,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	11,866,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	384	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,160,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	289,680	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,405,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	61,867,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	474,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,204,214,655	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	18,511,171	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	755,308,111	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,080,104	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	149,856,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	148,585,895	0
3.0	521211	Belanja Bahan	204,378,046	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	268,460,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	69,527,940	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	108,540,458	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	80,198,319	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	6,663,751	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,966,885	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,440,819	0
3.0	522141	Belanja Sewa	684,920,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	28,900,000	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	161,552,956	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	283,149,996	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223,652,912	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,531,552,436	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	251,562,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106,750,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	940,232,723	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	299,960,500	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510,350,000	0
3.1	425259	Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	840,000	0
3.1	425629	Pengembalian Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	6,400,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,127
JUMLAH			14,359,497,029	14,359,497,029

Keterangan :

FINAL

Padang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA



**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:01 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	963,828,503	852,899,309	110,929,194	13.006
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	963,828,503	852,899,309	110,929,194	13.006
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	963,828,503	852,899,309	110,929,194	13.006
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,443,837,548	5,833,329,018	610,508,530	10.466
Beban Persediaan	109,399,458	95,203,836	14,195,622	14.911
Beban Barang dan Jasa	2,689,110,696	2,425,932,554	263,178,142	10.849
Beban Pemeliharaan	506,802,908	249,451,991	257,350,917	103.167
Beban Perjalanan Dinas	2,830,097,159	2,623,212,804	206,884,355	7.887
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	299,960,500	299,428,141	532,359	0.178
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0800 ) SUMATERA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG**

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 3:01 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	457,405,921	424,305,113	33,100,808	7.801
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>13,336,614,190</b>	<b>11,950,863,457</b>	<b>1,385,750,733</b>	<b>11.595</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(12,372,785,687)</b>	<b>(11,097,964,148)</b>	<b>(1,274,821,539)</b>	<b>11.487</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	5,050,000	(5,050,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	5,050,000	(5,050,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,300,034	(1,300,034)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,300,034	(1,300,034)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>6,350,034</b>	<b>(6,350,034)</b>	<b>(100)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(12,372,785,687)</b>	<b>(11,091,614,114)</b>	<b>(1,281,171,573)</b>	<b>11.551</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(12,372,785,687)</b>	<b>(11,091,614,114)</b>	<b>(1,281,171,573)</b>	<b>11.551</b>

Keterangan :

FINAL

Padang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP

197608042003121003

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT ORGANISASI** : ( 07 ) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0800 ) SUMATERA BARAT  
**SATUAN KERJA** : ( 499346 ) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM  
 Tgl Cetak : 13/05/24 3:02 PM  
 Halaman : 1  
 lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,436,306,839	11,111,341,372	324,965,467	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,372,785,687)	(11,091,614,114)	(1,281,171,573)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(62,470,243)	(197,191,500)	134,721,257	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(62,470,243)	(197,191,500)	134,721,257	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,424,063,896	11,613,771,081	810,292,815	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11,192,034)	324,965,467	(336,157,501)	-
EKUITAS AKHIR	11,425,114,805	11,436,306,839	(11,192,034)	-

Keterangan :  
 FINAL

Padang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
 KPA



FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP  
 197608042003121003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT 07  
**SATUAN KERJA** : BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG 499346

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM  
Tgl Cetak : 13/05/24 3:03 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>13,755,908,000</b>	<b>13,388,427,399</b>	<b>(367,480,601)</b>	<b>97</b>	<b>12,600,569,000</b>	<b>12,473,020,424</b>	<b>(127,548,576)</b>	<b>99</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Padang, 13 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KRA  
  
**FAJAR KURNIAWAN, ST.,M.AP**  
197608042003121003

